

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Permasalahan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompot Anak Bangsa dilihat dalam tiga aspek. Dalam kepastian hukum, MoU kerjasama ini belum di perbaharui hingga sekarang padahal MoU tersebut sudah selesai sejak September 2019. Permasalahan terjadi karena adanya ketidak pastian hukum menyangkut MoU dan PKS pada regulasi sebelumnya. Sementara dalam aspek kelembagaan belum terdapat lembaga khusus dan setiap pihak belum menjalankan tugasnya dengan optimal terutama dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan aset serta kontrak. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tim pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, aspek kemampuan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan kemampuan terbaiknya dalam pengoptimalan kerjasama baik dalam aspek negosiasi maupun kontribusi karena lemahnya kemampuan pemerintah dalam hal tersebut.
2. Dampak dari permasalahan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT Dompot Anak Bangsa adalah perjanjian yang tidak sah dimata hukum, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak tidak dilaksanakan dengan baik, serta kepentingan pemerintah yang tidak dapat teradvokasikan dengan baik.
3. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan kerjasama pemanfaatan Go-Pay di BRT Trans Semarang adalah melakukan perbaikan pada

peraturan hukum sebelumnya, membentuk tim pengawasan dan pengendalian kerjasama di lingkup Kota Semarang, dan penerapan strategi negosiasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Setiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang yang terlibat dalam kerjasama Pemanfaatan Layanan Go-Pay di BRT Trans Semarang perlu untuk mengoptimalkan setiap pengawasan dalam kerjasama dengan menentukan parameter sehingga memudahkan untuk melakukan evaluasi. Dalam hal ini, bukan hanya perihal implementasi kerjasama yang diperhatikan, namun juga berkaitan dengan aspek hukum, kelembagaan, dan kemampuan pemerintahnya agar keberjalanan kerjasama dapat berjalan dengan optimal.

2. Bagi PT Dompot Anak Bangsa

Dapat berkontribusi untuk melakukan pengawasan keberjalanan kerjasama dengan selalu mengkomunikasikan kepada pihak Pemerintah Kota Semarang. Perusahaan ini juga dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap pemeliharaan aset yang dikelola dalam kerjasama tersebut.